

KOMUNIKASI KELOMPOK PENDAMPING DESA WUJUDKAN ASET LOKAL DESA SECARA EMANSIPATORIS

I Wayan Suartawan

Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Bali Dwipa

Email: suarta1@yahoo.com

Ni Nyoman Cipta Dewi

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Dwijendra

Email: ninvomanciptadewi84@gmail.com

Yohanes Julio Hermawan Rahu

Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Bali Dwipa

Email: juliorahu@gmail.com

Abstrak

Membangun Indonesia dari pinggiran serta mensejajarkan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan merupakan impian setiap pemimpin. Namun, implementasi hal tersebut mengalami berbagai kendala. Menghadapi masyarakat desa dengan berbagai latar belakang pendidikan, mata pencaharian, usia maupun kepentingan berbeda tidaklah mudah. Diperlukan metode komunikasi yang humanis dan efektif dalam mengajak partisipasi masyarakat untuk membangun desa dengan memanfaatkan aset desa demi kepentingan mereka, sehingga masyarakat desa mampu mewujudkan desa yang mandiri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dan variable yang terbatas. Data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik random atau *probability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kelompok yang dilakukan para Pendamping Desa mampu meyakinkan masyarakat untuk menggali potensi serta memanfaatkan aset desa demi terwujudnya kemandirian desa. Masyarakat mulai dilibatkan bersama pemerintah dalam membangun desanya sendiri.

Kata Kunci: Komunikasi kelompok, bangun desa mandiri

Abstract

Indonesian development from the periphery and aligning development between urban and rural areas is the dream of every leader. However, the implementation of this has encountered various obstacles. Dealing with rural communities with various educational backgrounds, livelihoods, ages and interests is not easy. Humanist and effective communication methods are needed in inviting community participation to build villages by utilizing village assets for their interests, so that rural communities are able to create independent villages. This study uses qualitative research that emphasizes the breadth of information, not depth, so this method is suitable for use with a wide population and limited variables. Sample data taken from the population by random or probability sampling technique. The results showed that the group communication carried out by the Village Facilitators was able to convince the community to explore the potential and utilize village assets for the realization of village independence. The community began to be involved with the government in building their own village.

Keywords: Group communication, Build an Independent Village.

1. PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dan desa merupakan upaya mensejajarkan kondisi desa dengan kota dalam aspek pembangunan, sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga kini pemerataan pembangunan secara keseluruhan belum optimal. Masih ada kesenjangan antara pembangunan di daerah perdesaan dan perkotaan. Perhatian Pemerintah Pusat dengan masyarakat desa mulai dirasakan semenjak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini menjadikan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya. Diketahui, sebelum diterbitkan UU tersebut, desa dan masyarakat desa selalu dijadikan objek serta topik saat kampanye saja, tanpa implementasi dari janji yang disampaikan saat kampanye tersebut.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan yang besar terhadap Pemerintah Desa, dalam hal ini desa dinas. Kewenangan tersebut antara lain desa bisa mengatur serta mengelola rumah tangga serta aset desa agar bisa dipergunakan untuk kepentingan desa sendiri. Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam hal menjalankan UU Desa, diperlukan pengetahuan serta pemahaman segenap unsur perangkat desa dan masyarakat. Perangkat Desa sebagai pelaku pembangunan di tingkat desa masih minim pemahaman berbagai aturan pelaksanaan UU Desa serta aturan turunannya. Perbedaan tingkat pendidikan, faktor usia, serta berbagai kendala sumber daya manusia di desa juga menjadi kendala. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Pusat juga menyebar ratusan Pendamping Desa profesional yang bertugas mendampingi serta memberdayakan masyarakat desa.

Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan di desa, sehingga Pendamping Desa yang merupakan bagian P3MD nantinya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang homogen tentu tidak mudah, diperlukan suatu metode komunikasi dan juga media yang tepat, sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa oleh Pendamping Desa (PD) merupakan langkah awal pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh sebab itu tentunya pola komunikasi PD menjadi hal yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di desa. Disisi lain, masyarakat desa juga memiliki peran dan fungsi yang besar dalam penentuan serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan, maka penyampaian informasi-informasi dalam musyawarah atau pertemuan tingkat desa oleh pendamping diperlukan juga suatu metode komunikasi yang efektif dengan media yang tepat. Menurut Everet M. Rogers, (1999) dalam Ninik Sri Rejeki dan Anita Herawati, (1999:21) penyuluh adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga. Penyuluh atau fasilitator berkewajiban untuk memberi yang masukan yang baik dalam proses pengambilan keputusan.

Lembaga-lembaga di tingkat desa atau kelompok masyarakat juga memiliki peran yang dominan. Seperti kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan dari seluruh unsur masyarakat desa yang salah satu tugasnya mendampingi dan mengontrol pelaksanaan Pemerintah Desa. BPD yang terdiri dari utusan masyarakat merupakan lembaga yang berwenang dalam bidang pengawasan dan menetapkan berbagai keputusan penting dalam musyawarah desa. Disamping itu lembaga lain di tingkat desa juga dituntut meningkatkan tanggung jawab dan kualitas kerja. Wasito Utomo (2006 : 3) menyebutkan bahwa birokrasi pemerintahan dan instansi apapun menuntut agar didalam pelayanan kepada publik atau masyarakat agar lebih prima dan memberikan yang terbaik.

Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab, wewenang serta hak mengelola potensi desa sesuai dengan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pelaku pembangunan di tingkat desa ini sangat penting peranannya bagi tercapainya tujuan bersama, yaitu yang terwujudnya masyarakat desa yang mandiri. Sebab melalui pelaku pembangunan di tingkat desa, berbagai undang-undang dapat disosialisasikan dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Perangkat Desa dan seluruh pelaku di tingkat desa maupun kecamatan dapat dikatakan pusat ataupun motor dalam melakukan proses pelaksanaan dan penyebaran informasi, proses penerangan, proses perubahan perilaku. Seperti pendapat berikut menyebutkan bahwa proses pendidikan dan sebagai rakayasa sosial (Madikanto, 1993: 11-17).

Komunikasi kelompok antara pelaku pembangunan dan masyarakat merupakan modal awal pemerataan pembangunan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran dan menimbulkan efek tertentu. Dalam definisi lain juga dijelaskan secara singkat bahwa komunikasi adalah cara berhubungan yang ditujukan pada orang lain atau massa/kelompok dengan menggunakan alat-alat komunikasi atau tanpa alat komunikasi yaitu komunikasi yang secara langsung berhadapan-hadapan atau *face to face* (Sihite, 2000: 49).

Menurut Rogers dan D. Lawrence (dalam Hafied Cangara, 2003:19) menyatakan komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Dari beberapa pengertian komunikasi diatas setidaknya komunikasi memiliki beberapa unsur seperti yang dikemukakan Hafied Cangara, (2004:23), adalah sebagai berikut, yakni: (1) sumber atau *source* dan penerima atau *receiver*. (2) pesan atau *message*, (3) media atau *channel*, dan (4) efek. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka menjadi semakin sulit membedakan antara media komunikasi massa dengan komunikasi antar pribadi. Sehingga semakin kabur untuk kita dalam memberikan definisi yang tepat. Misalnya saja internet bisa digunakan sebagai media untuk komunikasi antar pribadi dengan adanya surat elektronik atau e-mail. Akan tetapi juga dapat digunakan sebagai media massa, dalam hal ini jika internet dipergunakan untuk *website* yang berisi informasi-informasi yang sifatnya untuk disampaikan pada khalayak ramai.

Sementara itu, di desa-desa yang belum terjangkau oleh teknologi atau yang masih tradisional, media komunikasi juga mencakup kegiatan dan tempat-tempat tertentu seperti tempat suci atau pura, balai banjar, balai desa, panggung kesenian, pesta rakyat, termasuk juga arisan-arisan dapat dikatakan sebagai media komunikasi.

Menurut Efendi Gazali (dalam Ngalimun, 2017: 33), menyatakan komunikasi juga mesti saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Efendi Gazali, menjelaskan fungsi komunikasi ada empat fungsi utama komunikasi yaitu: 1) Menginformasikan (*to inform*), yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, kebijakan, peraturan maupun segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain; 2) Mendidik (*to educate*), yakni sebagai sarana pendidikan, karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan; 3) Menghibur (*to entertain*), komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain; 4) Mempengaruhi (*to influence*). Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain.

2. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian yaitu rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini dipilih peneliti karena peneliti menghendaki data yang berasal dari penelitian yang berupa hasil pengukuran presentase, dimana jenis dan jumlah indikator variabelnya ditentukan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2009:12), pada umumnya penelitian kualitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dan variable yang terbatas. Selanjutnya data yang diperoleh adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik random atau *probability sampling*. Berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi dimana populasi tersebut diambil.

Dalam hal mendapatkan data, peneliti juga meneliti secara acak informan di wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, mulai dari kepala desa (perbekel), tokoh masyarakat, pedagang dan masyarakat umum. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis, yakni: (1) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui media bukti wawancara. Teknik yang dilakukan oleh penulis dan informan (sumber informasi) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal yang akan diteliti. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder dan kamera untuk foto; (2) Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi; (3) Teknik dokumentasi adalah suatu teknik

pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan proses analisis dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data yang nantinya akan dianalisis sehingga data bisa disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah diimplementasikan. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau melalui tiga tahapan model alir dari (Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin, 2001: 297) yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sebenarnya tidak bisa lepas dari komunikasi kelompok antar pelaku pemberdayaan. Mengacu pada kata “*Empowerment*”, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan komunikasi kelompok pada pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Banjarangkan dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, sehingga mereka mampu membentuk sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu dan kelompok bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia, khususnya pendamping Desa (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal di Kecamatan Banjarangkan. Pemberdayaan tersebut merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kecamatan Banjarangkan dalam mengaktualisasikan dirinya terutama potensi yang dimiliki. Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program pemerintah yang dipayungi UU No. 06 Tahun 2014. Program ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dan mengembangkan potensi desa guna terwujudnya peningkatan dan pengentasan kemiskinan dan menuju tercapainya *Millenium Development Goals* atau MDGs.

Lewat UU tentang Desa, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Banjarangkan dilakukan dengan menyelaraskan permasalahan yang dimiliki pemerintahan desa yang cukup kompleks, serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Peran pemerintahan dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat desa. Media masyarakat dalam memberdayakan dirinya ada pada kegiatan

musyawarah, pertemuan dengan Pendamping Desa, pelatihan serta diskusi-diskusi kecil yang lokasinya sembarang.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Banjarangkan dalam penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Desa membuat Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan acuan UU Desa Tahun 2014. Melalui acuan tersebut APBDesa dirumuskan kembali mekanisme upaya memberdayakan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan atau pembangunan.

Dari data tersebut masyarakat di Kecamatan Banjarangkan penduduknya sebagian besar sebagai petani, sehingga tidak semua mengenal internet dan sebagian dari masyarakat juga masih mendengarkan radio dan menonton televisi, bahkan mereka paling sering berinteraksi saat ada kegiatan keagamaan yang mana didalamnya juga ada proses komunikasi dengan media tradisional. Jika proses sosialisasi dilakukan dengan media yang salah sudah tentu tidak akan mencapai sasaran, tentu tujuan yang akan dicapai juga tidak sesuai.

Masyarakat Kecamatan Banjarangkan masih kental dalam pelaksanaan tradisi, budaya, sehingga interaksi antar individu dan kelompok seara langsung masih sangat tinggi. Seperti yang diungkapkan Rogers dan Shoemaker (1987) mengatakan bahwa diantara saluran komunikasi yang ada, saluran interpersonal masih memegang peranan penting dibanding dengan media-media lainnya, terlebih di Negara yang belum maju dimana kurang tersedianya media massa yang banyak menjangkau khalayak, terutama warga pedesaan di Kecamatan Banjarangkan, yang lemah tingkat literasi medianya.

Situasi tersebut mengharuskan pelaku pemberdayaan masyarakat mampu mengajak partisipasi masyarakat terlibat dalam berbagai pembangunan, apakah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sehingga implementasi UU Desa sesuai arah. Ajakan tersebut akan berat tanpa diimbangi komunikasi yang baik antara pelaku pemberdayaan dan masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. UU Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UU Desa mengonstruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mesti mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur

dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan UU Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi UU Desa.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka itulah, Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan: (1) meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dari data hasil kuisioner yang disebar ke para responden yang merupakan pelaku pemberdayaan di masing – masing desa dan masyarakat yang menjadi sasaran dari program dan dipilih secara acak dengan metode sampling, menyatakan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan membangun desa dan meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan potensi desa. Partisipasi masyarakat dimulai sejak perencanaan pembangunan di tingkat dusun dan desa, pelaksanaan di tingkat desa hingga pengawasan.

Responden memilih pertemuan langsung merupakan cara yang paling sering mereka lakukan dalam menentukan keputusan atau dalam musyawarah, yaitu sebanyak 55 responden dari 66 responden atau 85% dan sebagian besar tidak pernah mengetahui sosialisasi melalui media komunikasi massa, karena memang media komunikasi massa jarang dipergunakan, selain jarang di pergunakan dalam bersosialisasi, media tersebut tidak bisa membuat masyarakat mengerti secara keseluruhan tentang program dan menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Hasil responden juga menyatakan di beberapa golongan masyarakat tertentu, seperti yang sering membaca koran, website, media sosial, mereka sebagian besar kalangan pelajar, dan beberapa orang yang tingkat pendidikannya atau memiliki kecukupan ekonomi lebih tinggi dan beberapa orang juga hidup merantau dan kebanyakan dari mereka bukan pelaksana program tingkat desa dan juga jarang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Pada umumnya mereka mengetahui melalui media komunikasi khususnya media massa dan media sosial. Dari data tersebut dapat diperoleh data bahwa masyarakat dan pelaku pembangunan di Kecamatan Banjarangkan yang tersebar di seluruh desa, memilih dan menyatakan bahwa pertemuan langsung adalah yang paling banyak dipergunakan dan dipakai yang bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuan program. Dari hasil wawancara

dapat diperoleh bahwa komunikasi langsung dan bertatap muka adalah komunikasi yang paling disukai oleh masyarakat, karena bisa membuat mereka mengerti dan mendapatkan informasi yang jelas. Tetapi di kalangan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini mereka menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi dan media massa atau media sosial adalah hal yang paling menarik.

4. PENUTUP

Simpulan

Simpulan dari data tersebut bahwa masyarakat dan pelaku pembangunan di Kecamatan Banjaringan yang tersebar di seluruh desa, memilih dan menyatakan bahwa pertemuan langsung adalah yang paling banyak dipergunakan dan dipakai yang bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuan program. Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa komunikasi langsung dan bertatap muka adalah komunikasi yang paling disukai oleh masyarakat, karena bisa membuat mereka mengerti dan mendapatkan informasi yang jelas. Tetapi di kalangan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini mereka menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi dan media massa atau media sosial adalah hal yang paling menarik.

Tahapan komunikasi kelompok yang dilakukan Pendamping Desa dalam mewujudkan aset desa yang emansipatoris yakni: (1) Diawali saat sosialisasi ke banjar/dusun di seluruh Kecamatan Banjaringan. Para Pendamping Desa bersama pihak terkait langsung bertemu dengan kelompok masyarakat di banjar atau dusun; (2) Dengan melaksanakan musyawarah desa perencanaan khusus perempuan. Musyawarah desa ini dilaksanakan setelah semua dusun melaksanakan musyawarah sosialisai tingkat dusun, setelah itu para pendamping desa akan menyarankan kepada pemerintahan desa sesuai aturan yang berlaku agar segera melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus perempuan merupakan salah satu musyawarah yang wajib dilaksanakan. Dimana dalam musyawarah ini hanya diikuti oleh para perempuan dan mendapatkan prioritas pertama dalam menyerap anggaran di APBDes bersangkutan. Mereka membuat berbagai usulan yang mengutamakan kepentingan kaum marjinal dan perempuan; (3) Musyawarah kelompok campuran, merupakan media komunikasi kelompok yang dilakukan antar berbagai kelompok di desa. Musyawarah ini merupakan musyawarah yang memprioritaskan penggunaan APBDes dalam berbagai kegiatan. Peserta musyawarah ini berasal dari seluruh komponen kelompok di desa, seperti, kelompok perempuan, kelompok pemuda, lansia dan masyarakat umum.

Musyawarah serta seluruh tahapan yang dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan kemandirian desa yakni: (1) meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri di desa; (2) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; (4) meningkatnya kapasitas

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*); (5) meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; (6) meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; (7) meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local; (8) meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberdayaan serta upaya mengoptimalkan aset desa secara emansipatoris melalui masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri. Sehingga terwujud cara untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*communitybased resource management*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bjorn, Hattne. 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan
- Cangara, H. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Oprasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2010. *Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan*. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjahna. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjahna. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory, An Introduction (2nd)*. Newbury Parks Sage
- Mulyana, Dedy. 1999. *Membangun Komunikasi yang Humanistik*. Bandung: Rosda
- Mulyana, Dedy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ruslan, Rosady. SH.MM. 2008. *Manajemen Pulic Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Senjaya, Sasa Djuarsa. 1993. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sumadi Dilla. 2006. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media